

No. 1-2 Th. X/November 2004  
ISSN 085-4-9559

# **BANDAR MAULANA**

## **JURNAL SEJARAH UNIVERSITAS SANATA DHARMA**

Negara-Negara Sedang Berkembang:  
Dari Ekspor Bahan Mentah Hingga Ekspor  
Produk Manufaktur

**Anton Haryono** \_\_\_\_\_

Demokrasi, Civil Society, dan Kapitalisme Global  
Pasca Perang Dingin

**Budiawan** \_\_\_\_\_

Hubungan Agama dan Negara Dalam Konteks  
Ketahanan Nasional: Tinjauan Kebijakan/Operasional

**G. Moedjanto** \_\_\_\_\_

Sepenggal Catatan Kusam

**Sastro Sukamiskin** \_\_\_\_\_

**CUPLIKAN HASIL WAWANCARA  
DENGAN BEKAS ROMUSHA**

No. 1-2 Th. X/November 2004  
ISSN 0854-9559

# **BANDAR MAULANA**

**JURNAL SEJARAH UNIVERSITAS SANATA DHARMA**

Pusat Studi Sejarah Indonesia, Universitas Sanata Dharma  
Jl. Sekeloa Selatan 1, Yogyakarta 55002  
Telp +62 274-213301, 213352 ext. 1346  
Fax +62 274-262383, E-mail : [indonesiana@staff.usd.ac.id](mailto:indonesiana@staff.usd.ac.id)

## **DEWAN REDAKSI**

### **Pelindung :**

Dr. Paul Suparno, S.J., M.S.T.  
*Rektor Universitas Sanata Dharma*

### **Penasihat :**

Dr. Fr. B. Alip, M.Pd., M.A.  
*Dekan Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma*  
Drs. H. Purwanta, M.A.  
*Ketua Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Sanata Dharma*

### **Pemimpin Redaksi :**

Drs. Silverio R. L. Aji Sampurno, M.Hum.  
*Ketua INDONESIA Universitas Sanata Dharma*

### **Anggota Redaksi :**

Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.  
Drs. G. Moedjanto, M.A.  
Dra. Lucia Juningsih, M.Hum.  
Drs. Anton Haryono, M.Hum.  
Drs. Hb. Hery Santosa, M.Hum.  
Drs. Ign. Sandiwan Suharso

### **Administrasi/Sirkulasi :**

F. Tri Haryadi  
M. Tri Erna S.

### **Alamat Redaksi :**

#### **INDONESIANA**

Pusat Studi Sejarah Indonesia, Universitas Sanata Dharma  
Tromol Pos 29, Mrican, Yogyakarta 55002  
Telp. +62-274-513301, 515352 ext. 1546  
Fax. +62-274-562383, E-mail : [indonesiana@staff.usd.ac.id](mailto:indonesiana@staff.usd.ac.id)



## KATA PENGANTAR

Setelah sekian lama 'tertidur', akhirnya jurnal **Bandar Maulana** dapat terbit kembali. Banyak hal yang menjadi alasan tidak terbitnya jurnal ini. Tetapi hal itu dikesampingkan saja, karena tentu menjadi tidak realistis jika diungkapkan. Hal perlu menjadi perhatian kita adalah bahwa **Bandar Maulana** dapat terbit kembali sebagai salah satu bentuk pengejawantahan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Jurnal **Bandar Maulana** kali ini menampilkan 4 karya tulis dan 1 transkrip hasil wawancara dengan mantan romusha. Tulisan pertama dari **Anton Haryono** yang mencoba untuk memahami lebih lanjut beberapa fenomena ekonomi yang menyertai perjalanan waktu negara-negara sedang berkembang. Penjelasan empirik dan teoretik atas kemunculan setiap era sebagaimana dimaksudkan pada bagian depan menjadi fokus bahasan. Mengingat ekspor maupun impor dalam bentuk apapun berkaitan dengan dunia luar, sudah barang tentu pembahasan terhadap fenomena ekonomi negara-negara sedang berkembang membutuhkan eksplorasi kontekstual dalam paradigma saling hubungan antara bagian dunia yang satu dengan bagian dunia lainnya.

Selanjutnya **Budiawan** mengajak kita untuk melihat perwujudan demokrasi, masyarakat sipil pasca Perang Dingin yang berhubungan erat dengan maraknya kapitalisme global. **G. Moedjanto**, mengajak kita untuk melihat hubungan antara agama dan negara dalam konteks ketahanan nasional yang dilihat dari perspektif kebijakan operasional.

Akhirnya **Sastro Sukamiskin** mengajak kita berpikir sejenak tentang kehidupan kerohanian di Nusantara ini. Selamat membaca.

**Silverio R. L. Aji Sampurno**



## DAFTAR ISI

Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Negara-Negara Sedang Berkembang: Dari Ekspor Bahan Mentah Hingga Ekspor Produk Manufaktur <b>Anton Haryono</b> .....	1
Demokrasi, <i>Civil Society</i> , dan Kapitalisme Global Pasca- Perang Dingin <b>Budiawan</b> .....	25
Hubungan Antara Agama Dan Negara Dalam Konteks Ketahanan Nasional: Tinjauan Kebijakan/ Operasional <b>G. Moedjanto</b> .....	33
Sepenggal Catatan Kusam <b>Sastro Sukamiskin</b> .....	53
Cuplikan Hasil Wawancara dengan Bekas Romusha .....	63

# **NEGARA-NEGARA SEDANG BERKEMBANG: DARI EKSPOR BAHAN MENTAH HINGGA EKSPOR PRODUK MANUFAKTUR**

**Oleh: Anton Haryono**

## **Pengantar**

Dalam lintasan historisnya, banyak negara yang kini sering digolongkan sebagai negara sedang berkembang tidak hanya telah mengalami transformasi politik dari negara kolonial ke negara merdeka tetapi juga telah mengalami transformasi ekonomi. Meski tidak harus berjalan seiring dengan transformasi politiknya, banyak negara sedang berkembang tidak selamanya berkubang pada status eksportir bahan mentah, tetapi secara evolutif mampu berposisi dalam status baru sebagai eksportir produk manufaktur. Bila dua era disambungkan, yakni era ekspor bahan mentah dan era ekspor produk manufaktur, maka akan terbentuk garis waktu yang di dalamnya terdapat masa transisi, yakni masa industri substitusi impor.

Sebagaimana diketahui, ketika negara-negara sedang berkembang berstatus sebagai eksportir bahan mentah, pada saat yang sama negara-negara itu merupakan importir produk manufaktur. Industri substitusi impor muncul di sejumlah negara kolonial sebagai alternatif baru ketika disadari bahwa depresi besar dunia pada 1929 telah amat merugikan mereka. Dengan menilik kasus Indonesia, misalnya, krisis ini berdampak sangat buruk bagi kebutuhan pangan penduduk yang sebelumnya telah gagal memenuhi standar Barat yang paling sederhana<sup>1</sup>. Namun, peristiwa kelabu dunia itu juga merangsang bagi perkembangan sektor industri, termasuk industri rakyat. Disadarkan oleh bahaya struktur perekonomian yang tidak seimbang, pemerintah kemudian berusaha memajukan industri untuk pasar dalam

---

<sup>1</sup> W.F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 82.

negeri<sup>2</sup>.

Akibat buruk dari depresi besar dunia pada 1929 yang dialami Indonesia juga dialami oleh negara-negara tropis eksportir bahan mentah dan importir produk manufaktur lainnya. Sebagaimana dilihat oleh Wertheim dan Burger untuk kasus Indonesia, Arthur Lewis juga melihat bahwa depresi besar dunia itu telah merangsang bagi negara-negara tropis lainnya tadi untuk melakukan industrialisasi substitusi impor<sup>3</sup>. Penceburan negara-negara tropis ke dalam industri substitusi impor semakin membengkak terutama setelah Perang Dunia Kedua. Menurut Lewis, setelah mengalami pertumbuhan yang cepat selama dua dekade, pada akhir 1960an sejumlah negara telah mencapai batas substitusi impor dan industrialisasi mulai melambat. Dari titik jenuh substitusi impor ini, industrialisasi di negara-negara tropis (negara-negara sedang berkembang) hanya dapat dipertahankan dengan orientasi ekspor<sup>4</sup>.

Dari kecenderungan ekspor bahan mentah dan impor produk manufaktur, melalui fase transisi pengembangan industri substitusi impor, menuju kecenderungan ekspor manufaktur yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang, secara jelas menunjukkan adanya perubahan. Namun demikian perubahan yang dapat diamati itu tidak serta merta mengubah status "sedang berkembang" menjadi "maju" bagi negara-negara tropis tersebut. Bahkan, walaupun industrialisasi terus digalakkan, tetap saja kebanyakan negara-negara tropis tidak dapat disebut sebagai negara industri seperti yang dikenakan kepada negara-negara maju, khususnya negara-negara di Eropa.

---

<sup>2</sup> D.H. Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia II* (Djakarta: Pradnja Paramita, 1970), hlm. 193. Tentang panorama sejarah ekonomi Indonesia dalam rentang waktu yang cukup panjang saya telah menulis artikel berjudul "Dari Rakyat Legitimasi Dibangun, Kepada Rakyat Eksploitasi Diarahkan: Indonesia Pra-Kolonial, Kolonial, dan Pasca-Kolonial" dalam Silverio R.L. Aji Sampurno dkk (ed), *Indonesia Alternatif: Rakyat Sebagai Pemegang Kedaulatan Tertinggi* (Yogyakarta: LPUSD, 2003), hlm. 3-49.

<sup>3</sup> W. Arthur Lewis, *The Evolution of the International Economic Order* (Princeton: Princeton University Press, 1978), hlm. 26.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 31-32.



Barat dan Amerika Serikat. Secara umum, kesenjangan dalam hal kemampuan ekonomi di antara dua kelompok negara itu masih cukup lebar.

Tulisan ini tidak pertama-tama dimaksudkan untuk melihat kesenjangan tadi, melainkan terutama untuk memahami lebih lanjut beberapa fenomena ekonomi yang menyertai perjalanan waktu negara-negara sedang berkembang. Penjelasan empirik dan teoretik atas kemunculan setiap era sebagaimana dimaksudkan pada bagian depan menjadi fokus bahasan. Mengingat ekspor maupun impor dalam bentuk apapun berkaitan dengan dunia luar, sudah barang tentu pembahasan terhadap fenomena ekonomi negara-negara sedang berkembang membutuhkan eksplorasi kontekstual dalam paradigma saling hubungan antara bagian dunia yang satu dengan bagian dunia lainnya. Internalitasnya seperti apa dan eksternalitasnya berkarakter macam apa perlu untuk ditelusuri. “Perubahan-perubahan” dalam “ketidakberubahan” yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang kiranya mengait erat dengan hal serupa tetapi dengan “nilai” yang berbeda yang dirajut oleh negara-negara maju.

Lebih lanjut, tulisan ini juga berkepentingan untuk melihat bagaimana para ahli memahami setiap fenomena ekonomi yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang. Sebagaimana diketahui, silang pendapat dalam memahami apa yang terjadi di negara-negara sedang berkembang bukanlah hal yang sulit ditemukan. Silang pendapat para ahli juga tampak menonjol ketika rekomendasi-rekomendasi untuk menemukan solusi atas berbagai persoalan dalam konteks pembangunan diajukan. Ini semua, selain menunjukkan adanya perbedaan basis teoretik, sekaligus menjadi penanda tidak begitu mudahnya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang untuk diatasi.

Meskipun negara-negara sedang berkembang yang dibicarakan dalam tulisan ini pernah mengalami kolonialisme, dan dalam banyak aspek dipengaruhi olehnya, fenomena ekonomi yang muncul beserta persoalan-persoalannya yang

rumit kiranya tidak akan memadai bila hanya dipahami dari segi historisitas spesifik seperti itu. Apabila kolonialisme dan neo kolonialisme dipahami sebagai satu-satunya "biang" dari segalanya, kita tidak hanya akan terjebak dalam determinisme yang akut, tetapi juga tidak produktif untuk melihat "duduk perkara" dalam perspektif ekonomi yang lebih komprehensif. Hal ini dikemukakan bukan dalam rangka mengeliminasi faktor negatif kolonialisme ataupun neokolonialisme dalam sejarah ekonomi negara-negara bekas jajahan, tetapi untuk dapat dilihatnya berbagai faktor dari perspektif ekonomi (sedapat mungkin) secara proporsional.

### **Ekspor Bahan Mentah: Minimnya Industrialisasi**

Kecenderungan ekspor bahan mentah oleh negara-negara tropis, yang disertai impor produk manufaktur, telah berlangsung cukup lama. Permintaan bahan mentah oleh negara-negara industri yang semula relatif kecil, kian membesar sejak akhir abad ke-19, atau yang oleh Lewis disebut sebagai awal revolusi industri ke-2, terutama untuk komoditas karet, tembaga, minyak, dan boksit. Dibangunnya jaringan kereta api di negara-negara jajahan dan kemajuan angkutan laut pada perempat terakhir abad ke-19 ikut menopang ekspansi perdagangan

internasional itu<sup>5</sup>. Bila ditilik dari kekuatan kumulatif yang tercipta, kesempatan berdagang secara substansial dapat meningkatkan pendapatan nasional bagi negara-negara tropis yang berpartisipasi di dalamnya. Lebih lanjut, seiring dengan meningkatnya pendapatan secara terus menerus selama 60-70 tahun, hingga depresi dunia 1929, permintaan negara-negara tropis terhadap produk manufaktur dari luar juga membesar<sup>6</sup>.

Era kecenderungan ekspor bahan mentah, yang kemudian juga diikuti dengan impor produk manufaktur, menunjukkan sedemikian minimnya perhatian terhadap pengembangan

---

<sup>5</sup>. *Ibid.*, hlm. 5-7.

<sup>6</sup>. *Ibid.*, hlm. 21.



industri di negara-negara tropis pada periode panjang itu. Bila gaung revolusi industri segera disambut oleh sejumlah negara beriklim sedang, maka hal itu tidak terjadi di sebagian besar negara tropis. Realitas ini dicoba dipahami oleh Lewis, tidak pertama-tama dari sudut pandang politis, tetapi terutama dari sudut pandang ekonomis. Menurutnya, dalam waktu yang cukup lama, kekuasaan imperial memang musuh bagi industrialisasi di koloni-koloninya. Namun, pada pertengahan abad ke-19 banyak negeri yang relatif merdeka juga tidak dapat melakukan industrialisasi. Dari realitas ini, Lewis kemudian mencoba untuk menganalisisnya dari perspektif ekonomi dan menemukan adanya ketergantungan revolusi industri terhadap revolusi pertanian yang terjadi sebelumnya atau pada waktu bersamaan.

Analisis ekonomi Lewis itu tidak hanya didasarkan pada logika akal sehat, tetapi juga didasarkan pada data-data empiris. Inggris pun, sebagai pelopor revolusi industri pada akhir abad ke-18, memiliki produktivitas pertanian yang paling tinggi. Revolusi ini, seperti dikemukakan Lewis, meluas secara cepat di negara-negara lain yang juga telah merevolusikan sektor pertaniannya, terutama di Eropa Barat dan Amerika Utara, dan tidak menuju dalam kecepatan yang signifikan ke negara-negara dengan produktivitas pertanian yang rendah<sup>7</sup>. Interdependensi antara sektor pertanian dan industri juga tampak dalam tulisan Livingstone. Dikemukakan, sektor pertanian yang subur akan memfasilitasi pengembangan industri. Pendapatan yang diperoleh akan menyajikan daya beli yang perlu bagi ukuran minimum pabrik industri. Produktivitasnya yang tinggi, yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan pangan dengan lebih mudah, akan menyediakan tenaga kerja bagi industri. Lebih lanjut, suplai tabungan dan hasil pajak dari sektor pertanian yang makmur dapat dipakai untuk meningkatkan pembangunan, tak terkecuali untuk sektor industri<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup>. *Ibid.*, hlm. 8-10.

<sup>8</sup>. I. Livingstone, "Agriculture versus Industry in Economic Development" dalam I. Livingstone (ed), *Economic Policy for Development: Selected Readings* (Middlesex: Pinguin Books, 1971), hlm. 236.



Tiadanya iklim investasi sudah barang tentu merupakan faktor penghambat bagi industrialisasi. Setidaknya pada abad ke-19, menurut Lewis, kekuasaan yang masih terkonsentrasi di tangan kelas penguasa tanah, seperti di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, dan bahkan juga di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, merupakan penghalang tersendiri. Mereka adalah kelas yang diuntungkan oleh impor murah, sehingga tidak ada alasan untuk mendukung munculnya kelas industri baru. Ketika peluang bagi industrialisasi secara internal sulit dilakukan, maka penyesuaian yang lebih mungkin bagi negara-negara tadi adalah menjadi pengekspor produk-produk pertanian<sup>9</sup>.

Ketika permintaan negara-negara tropis terhadap produk manufaktur kian meluas, hanya beberapa negara saja seperti India, Ceylon, Brasilia, dan Mexico yang membangun industri modernnya sendiri, dan itupun dengan kemajuan yang lamban. Selain yang telah disebutkan di muka, faktor perintang bagi pengembangan industri modern di negara-negara tropis antara lain<sup>10</sup>: pertama, sebagian besar perdagangan impor-ekspor dikuasai oleh kekuatan asing, sehingga keuntungan terbesar mengalir kepada mereka, dan hal ini mengurangi ketersediaan dana dan usaha untuk investasi dalam manufaktur domestik. Kedua, partisipasi dalam dunia perdagangan internasional sendiri menambah nafsu konsumtif atas barang-barang buatan luar negeri sehingga menghancurkan industri lokal. Ketiga, tiadanya perlindungan pemerintah terhadap industri manufaktur yang masih lemah (tradisional), misalnya melalui kebijakan tariff dan kuota.

Meskipun permintaan terhadap produk-produk manufaktur terus meningkat, investasi industrial untuk menghasilkan produk-produk itu belum muncul secara signifikan di sebagian besar negara tropis kolonial, sebelum mereka merasakan "pukulan maut" depresi dunia 1929. Investasi swasta asing jelas sudah lama masuk, dan dari waktu ke waktu terus membesar;

---

<sup>9</sup>. W. Arthur Lewis, *op.cit.*, hlm. 10-11.

<sup>10</sup>. *Ibid.*, hlm. 22-24.

namun, investasi ini diarahkan untuk eksploitasi bahan mentah atau bahan baku industri dalam rangka mengakomodasi permintaan pasar ekspor. Tidak heran jika investasi swasta asing pada waktu itu diarahkan pada sektor perkebunan dan pertambangan. Pemerintah kolonial bahkan juga pasca-kolonial tidak banyak berhasil menarik jumlah investasi asing secara signifikan ke dalam industri domestik antara lain disebabkan oleh sempitnya pasar domestik<sup>11</sup>. Artinya, meski permintaan terhadap produk manufaktur terus meluas, hal ini dipahami oleh para investor sebagai belum memenuhi syarat skala minimum pasar.

Investasi kapitalistik yang memang berorientasi pada keuntungan, sudah barang tentu akan mempertimbangkan potensi pasar<sup>12</sup>. Ketika pasar itu berada di negara-negara maju, dan dalam komoditas bahan baku industri, maka investasi akan diarahkan ke sektor-sektor eksploitasi bahan baku ekspor. Dengan sendirinya, akumulasi kapital juga akan difokuskan pada sektor ini, dan bukan pada sektor industri manufaktur domestik, bahkan terlepas apakah investornya korporasi asing atau bukan. Ragnar Nurkse, ketika mengkaji persoalan-persoalan pembentukan modal di negara-negara *underdeveloped*, secara tegas menyatakan bahwa dorongan investasi dibatasi oleh ukuran pasar. Dikemukakan, di negara-negara miskin penanaman modal dalam produksi barang dan jasa untuk pasar domestik terhalangi oleh ukuran pasar yang kecil, atau daya beli domestik yang tidak memadai<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> H. Mynt, "The Classical Theory of International Trade and Underdeveloped Countries" dalam I. Livingstone (ed), *Economic Policy*....., *op.cit.*, hlm. 108-109.

<sup>12</sup> Dalam terminologi antropologi ekonomi, perilaku demikian sering disebut sebagai ekonomi rasional yang berbeda dengan ekonomi moral. Lihat E.E. LeClair dan Harold K. Schneider (ed), *Economic Anthropology: Reading in Theory and Analysis* (New York: Holt, Rinehart, and Winston, Inc., 1968); Safri Sairin dkk, *Pengantar Antropologi Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002); dan Ahimsa Putra dkk, *Ekonomi Moral, Rasional, dan Politik dalam Industri Kecil di Jawa: Esai-esai Antropologi Ekonomi* (Yogyakarta: Kepel Press, 2003).

<sup>13</sup> Ragnar Nurkse, *Problem of Capital Formation in Underdeveloped Countries* (Oxford: Basil Blackwell, 1953), hlm. 6.



## Ekonomi Subsisten dan Perdagangan Internasional

Sempitnya pasar domestik yang telah menghalangi pengembangan industri manufaktur modern di negara-negara sedang (belum) berkembang, terutama pada masa kolonial, antara lain diindikasikan oleh masih sedemikian kuatnya ekonomi subsistensi massa rakyat. Walaupun perekonomian ini secara evolutif mencair, pada rentang waktu yang cukup lama telah turut serta menciptakan kondisi masyarakat dengan daya beli yang rendah. Nurkse mengemukakan, faktor yang amat penting yang menentukan ukuran pasar adalah produktivitas. Ukuran pasar tidak hanya ditentukan, tetapi secara nyata ditegaskan, oleh volume produksi. Produktivitas sendiri sebagian besar sangat tergantung pada tingkat penggunaan modal dalam produksi<sup>14</sup>. Dapatlah dimaklumi jika masyarakat pertanian yang masih hidup dalam dunia subsistensi tidak mampu menjadi pasar yang memadai bagi industri manufaktur domestik. Ketika industri ini muncul dalam skala kecil, produk-produk yang dihasilkan kalah bersaing baik dari segi mutu maupun harga dengan produk massal dari luar<sup>15</sup>.

Kecenderungan ekspor bahan mentah, yang kemudian diikuti dengan impor produk manufaktur, praktis telah terjadi ketika masyarakat di negara-negara tropis kolonial masih diselimuti oleh kehidupan subsistensi. Pertanyaan pun kemudian muncul, yakni perihal bisa ditariknya masyarakat yang masih dalam tataran secukup hidup ke dalam perdagangan internasional. Memang proporsi terbesar perdagangan internasional itu dikuasai oleh investor asing; namun, rakyat juga terlibat, terutama dalam komoditas pertanian. Selain itu, perusahaan-perusahaan asing juga melibatkan tenaga kerja rakyat dan para

---

<sup>14</sup>. *Ibid.*, hlm. 8-9.

<sup>15</sup>. Sebagaimana telah diketahui, perkembangan industri di Eropa Barat memerlukan pasar di koloni-koloninya untuk produk-produk yang dihasilkan secara massal dan murah. Lihat Anton Haryono, "Dari Rakyat...", *op.cit.*, hlm. 23.



imigran dari Cina dan India<sup>16</sup>. Bagaimana perdagangan internasional yang menyeret masuk negara-negara tropis kolonial harus dipahami, ternyata telah menimbulkan perdebatan.

Menurut pokok pikiran Adam Smith dalam *Wealth of Nations*, perdagangan internasional mengatasi sempitnya pasar dalam negeri dan menyajikan jalan keluar bagi surplus produksi di atas kebutuhan domestik (teori "saluran surplus"). Selain itu, dengan meluasnya pasar, perdagangan internasional juga memperbaiki pembagian kerja dan meningkatkan produktivitas umum dalam negara (teori "produktivitas"). Menurut H. Mynt, dalam interpretasi mengenai spesialisasi perdagangan internasional, teori produktivitas berbeda dengan teori biaya komparatif<sup>17</sup>. Teori produktivitas memahami perdagangan internasional sebagai kekuatan dinamis yang dengan meluasnya pasar dan jangkauan pembagian kerja meningkatkan kecakapan dan ketangkasan kerja, mendorong inovasi teknik, mengatasi ketakterbagian teknis, dan memungkinkan negara yang berdagang menikmati hasil dan perkembangan ekonomi yang meningkat. Sementara itu, teori biaya komparatif memandangnya semata-mata sebagai suatu gerakan sepanjang kurve kemungkinan produksi statis yang tersusun atas sumber daya tertentu dan teknik-teknik tertentu dalam negara yang berdagang.

Dalam teori biaya komparatif, spesialisasi yang dipahami sebagai realokasi sumber daya merupakan proses yang sepenuhnya dapat dibalikkan. Sementara itu, spesialisasi menurut Adam Smith merupakan perubahan dan pembentukan kembali struktur produksi suatu negara untuk memenuhi permintaan ekspor, dan oleh karena itu tidak mudah dibalikkan. Hal ini berarti bahwa, suatu negara yang mengkhususkan pada

---

<sup>16</sup>. Perihal tenaga kerja imigran dari Cina dan India, Lewis mengemukakan bahwa pada paruh kedua abad ke-19 puluhan juta tenaga kerja meninggalkan dua negeri itu untuk bekerja terutama sebagai tenaga kerja kontrak di negara-negara tropis kolonial (hlm. 14).

<sup>17</sup>. H. Mynt, *op.cit.*, hlm. 86-88.

pasar ekspor lebih mudah kena serang (terpukul) oleh perubahan-perubahan dalam perdagangan daripada yang diperhitungkan oleh teori biaya komparatif. Dalam iklim mental ekspansif abad ke-19, menurut Mynt, aspek produktivitas dari spesialisasi perdagangan internasional sepenuhnya dikuasai oleh aspek yang mudah kena serang (goncangan).

Secara faktual, nilai total dan hasil fisik ekspor negara-negara tropis pada abad ke-19 berkembang pesat. Namun, menurut Mynt, hal ini dicapai tidak sungguh-sungguh dalam cara yang dibayangkan oleh Smith, yakni pembagian kerja dan spesialisasi yang lebih baik yang mengarah ke inovasi dan kemajuan kumulatif dalam kecakapan dan produktivitas setiap pekerja, baik pekerja pada sektor perkebunan dan pertambangan, maupun pada sektor ekspor petani. Pengembangan produksi ekspor petani misalnya dicapai secara sederhana, yakni menanam lebih banyak tanah dengan metode yang sama seperti yang dipakai dalam ekonomi subsistensi. Bahkan, ketika tanaman-tanaman ekspor alternatif (baru) diperkenalkan tidak juga terdapat perubahan metode yang signifikan<sup>18</sup>.

Teori biaya komparatif mengasumsikan bahwa sumberdaya suatu negara adalah terbatas dan sepenuhnya telah digunakan sebelum negara itu masuk ke dalam perdagangan internasional. Fungsi perdagangan, oleh karena itu, adalah realokasi sumberdaya tertentu dengan lebih efisien antara produksi domestik dan produksi ekspor. Produksi ekspor dapat ditingkatkan hanya dengan mengurangi produksi domestik. Sementara itu, teori fungsi permintaan berasumsi bahwa suatu negara yang sebelumnya terisolasi, yang baru saja masuk ke dalam perdagangan luar negeri, memiliki beberapa jenis surplus kapasitas produksi. Fungsi perdagangan tidak untuk realokasi sumberdaya tertentu, tetapi untuk mengakomodasi permintaan efektif baru terhadap output dari surplus sumberdaya yang akan tetap tak terpakai bila tidak ada perdagangan internasional.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 89-90.



Produksi ekspor dapat ditingkatkan tanpa harus mengurangi produksi domestik<sup>19</sup>.

Suatu negara yang baru akan masuk ke dalam perdagangan internasional telah memiliki surplus kapasitas produksi karena negara itu menderita ketidakseimbangan atau disproporsi antara kapasitas produksi dan kapasitas konsumsi. Dalam konteks masyarakat pertanian, hal ini ditandai oleh tanah yang masih berlimpah dibanding dengan jumlah penduduknya. Artinya, terdapat surplus tanah yang belum terpakai. Sementara itu, ketika masih terisolir (belum masuk ke perdagangan internasional), tenaga kerja yang ada yang sesungguhnya tidak cukup banyak belum pula digunakan secara optimum, karena kehidupan secara riil masih bertaraf subsistensi atau organisasi ekonomi belum berkembang (pasar setempat masih sangat sempit). Artinya, tenaga kerja yang terbatas itupun bisa dikatakan memiliki surplus (tenaga kerja tak produktif).

Menurut Mynt, teori saluran surplus menyajikan pendekatan yang lebih memadai daripada teori konvensional bagi tipe ekspansi perdagangan internasional di negara-negara sedang (belum) berkembang. Laju ekspansi yang tinggi dari produk ekspor mereka tidak dapat dijelaskan dari perspektif biaya komparatif yang berdasar pada asumsi sumberdaya tertentu dan teknik tertentu. Dari ekspansi itu tidak dijumpai bagian yang signifikan adanya perubahan-perubahan revolusioner dalam teknik dan peningkatan produktivitas. Produksi ekspor petani berkembang melalui perluasan penanaman dengan tetap memakai metode-metode produksi tradisional. Sementara itu, sektor perkebunan dan pertambangan berkembang atas dasar meningkatnya suplai tenaga kerja murah. Pendekatan saluran surplus yang mengarahkan perhatian ke kepadatan penduduk sebagai faktor yang menentukan kapasitas ekspor juga memiliki kelebihan daripada teori konvensional<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup>. *Ibid.*, hlm. 91

<sup>20</sup>. *Ibid.*, hlm. 95-96.



Ekspansi produksi ekspor yang cepat di negara-negara jajahan pada abad ke-19 tidak dapat dijelaskan secara memuaskan tanpa mendalilkan bahwa negara-negara itu memulainya dengan sejumlah besar surplus kapasitas produksi yang terdiri atas sumber daya alam yang belum terpakai maupun tenaga kerja setengah menganggur (tidak produktif). Surplus kapasitas produksi menyajikan kepada mereka barang-barang yang sebenarnya "tak berharga" untuk memperoleh barang-barang impor yang tidak perlu menyita atau mengurangi sumberdaya dari produksi domestik, tetapi semata-mata memerlukan pekerjaan yang lebih penuh untuk tenaga kerja semi menganggurnya. Ini tidak berarti bahwa, apalagi dalam konteks kolonial, tidak terjadi pengorbanan-pengorbanan tertentu dari penduduk.

Mengingat ketika jumlahnya masih relatif kecil tenaga kerja pertanian telah menunjukkan ciri-ciri tidak (kurang) produktif, maka ketika jumlahnya kian membesar pengangguran terselubung di daerah pertanian padat penduduk makin menguat. Menurut Nurkse, dengan adanya pengangguran terselubung, sebagian penduduk yang bekerja di sektor pertanian dapat digeser tanpa harus mengurangi output pertanian. Dengan kata lain, output pertanian yang sama dapat diperoleh dengan jumlah tenaga kerja yang lebih kecil, kendati tidak ada perubahan teknik bercocok tanam. Dari sudut pandang ini Nurkse memahami bahwa dalam suatu negara pertanian yang ditandai oleh pengangguran terselubung yang tinggi terdapat "tabungan" potensial yang tersembunyi yang bisa dimobilisir untuk berbagai proyek (akumulasi kapital) tanpa harus mengurangi output pertanian<sup>21</sup>.

### **Industri Substitusi Impor**

Depresi dunia 1929 yang amat menekan negara-negara tropis, seperti telah disinggung pada bagian depan, memberikan

---

<sup>21</sup>. Ragnar Nurkse, *op.cit.*, hlm. 32-38.

daya dorong bagi industrialisasi untuk substitusi impor. Hal ini tampak menonjol terutama di Amerika Latin. Depresi itu telah mematahkan kekuatan resistensi politik terhadap industrialisasi, baik yang datang dari kekuasaan imperial maupun dari kelompok-kelompok kepentingan domestik dalam produk primer. Hal demikian juga tampak dalam kasus Indonesia sejak 1930an di mana capaian perkembangan industri sejak krisis dunia itu tampak tak tertandingi oleh periode manapun sebelumnya. Bukan hanya orang-orang miskin saja yang mencari kesempatan kerja di sektor industri, tetapi kelas menengah Indonesia kala itu juga ikut menciptakannya<sup>22</sup>. Kemajuan besar tampak pada industri tenun di Jawa Barat, dan setelah 1935 juga industri-industri modern modal asing seperti dari Amerika, Inggris, Jerman, dan Belgia<sup>23</sup>.

Seperti telah dikemukakan oleh Lewis, setelah Perang Dunia Kedua negara-negara tropis menghablur ke dalam substitusi impor. Perkembangan cepat terjadi pada 1950an dan 1960an di mana produksi industri negara-negara ini tumbuh sekitar 6,5 persen setiap tahun. Namun, pada akhir 1960an sejumlah negara telah mencapai batas substitusi impor dan kecepatan industrialisasi mulai melambat<sup>24</sup>. Salah satu problem utama kecenderungan melambat itu adalah pasar dalam negeri yang terbatas. Daya beli masyarakat rendah karena produktivitas mereka juga rendah. Produktivitas yang rendah setidaknya dapat dilihat dari proporsi pengangguran terselubung dalam sektor pertanian yang cukup tinggi, terutama di negara-negara berpenduduk padat dan sekaligus dengan laju pertumbuhan yang tinggi.

Surplus tenaga kerja yang cukup tinggi di negara-negara sedang berkembang menjadi salah satu acuan bagi argumen pentingnya industrialisasi. Bagi pendukung-pendukungnya, industrialisasi akan menyerap kelebihan tenaga kerja. Namun,

---

<sup>22</sup> W.F. Wertheim, *op.cit.*, hlm. 83.

<sup>23</sup> D.H. Burger, *op.cit.*, hlm. 195-197.

<sup>24</sup> W. Arthur Lewis, *op.cit.*, hlm. 31.



menurut Livingstone, bukti kuat yang ada memperlihatkan bahwa dalam praktik industri manufaktur tidak dapat menyerap tenaga kerja dengan laju yang amat cepat<sup>25</sup>. Hal ini kiranya berkaitan dengan tingginya surplus tenaga kerja di satu sisi, dan rendahnya kemampuan suatu negara untuk membangun industri dalam skala yang memadai. Apalagi industri, terutama dalam skala besar, dihantui oleh kebijakan upah minimum buruh dan tersedianya modal yang mencukupi. Dari kenyataan itu, Livingstone merekomendasikan bahwa untuk menyerap kelebihan tenaga kerja, pembangunan pertanian relevan untuk digiatkan, tanpa harus mengabaikan realitas kelangkaan tanah. Menurutny, pertanian tidak hanya bersifat *labour intensive* yang tinggi, tetapi juga memiliki fungsi produksi yang fleksibel<sup>26</sup>.

Industrialisasi juga sering dianjurkan dengan pertimbangan untuk meningkatkan keuntungan (penghasilan), karena industri dipahami menawarkan kesempatan secara tetap untuk meningkatkan spesialisasi dan pembagian kerja, aplikasi mesin, dan menyajikan kesempatan yang lebih besar untuk inovasi dan pengenalan teknologi baru. Sebaliknya, hasil pertanian dikatakan, bila tidak berkurang, maksimal konstan, yang diperoleh dengan menanam lebih banyak tanah dengan metode-metode produksi yang kurang lebih sama. Erat berhubungan dengan pemikiran tentang penghasilan yang meningkat dalam industrialisasi adalah apa yang lazim disebut "ekonomi eksternal". Dalam menaksir nilai proyek investasi, yang relevan bukanlah keuntungan privat, tetapi produk marginal sosial keuntungan total yang diperoleh, bahkan oleh proyek-proyek lain, dari pembangunan proyek itu<sup>27</sup>.

Dengan menilik deskripsi Livingstone, sesungguhnya masih banyak argumen tentang arti penting industrialisasi. Satu hal yang menonjol dari deskripsi itu adalah bahwa setiap argumen mendapatkan bantahannya tersendiri. Apalagi jika argumen itu

---

<sup>25</sup>. I. Livingstone, *op.cit.*, hlm. 238.

<sup>26</sup>. *Ibid.*

<sup>27</sup>. *Ibid.*, hlm. 241.

telah merendahkan posisi pertanian. Argumen dan kontra-argumen memberikan petunjuk yang jelas perihal tidak mudahnya mendesain pembangunan di negara-negara sedang berkembang. Hal ini kiranya disebabkan oleh kompleksitas persoalan yang harus dipecahkan: surplus tenaga kerja yang sedemikian tinggi, tabungan dan modal yang tidak memadai, produktivitas dan daya beli masyarakat yang rendah, kesenjangan dan ketergantungan terhadap negara-negara maju yang tinggi, dan lain-lain.

Kepadatan penduduk yang tinggi, yang telah menimbulkan berbagai persoalan krusial, oleh B.F. Hoselitz dipahami sebagai faktor yang mendukung eksistensi industri kecil di negara-negara Asia<sup>28</sup>. Hal ini setidaknya berlaku hingga pertengahan abad ke-20 ketika tulisan Hoselitz dipublikasikan. Dikatakan, industri kecil biasanya lebih bersifat padat karya daripada industri besar. Selain itu, koefisien modal tambahan pada industri kecil juga tampak lebih rendah. Mengingat secara relatif terdapat kelimpahan tenaga kerja dan kelangkaan modal, rata-rata ukuran industri di Asia lebih kecil daripada yang berkembang di Barat<sup>29</sup>.

Menurut Hoselitz, dalam konteks Asia, produktivitas industri kecil kurang dari seperlima produktivitas industri besar. Bahkan produktivitas industri kecil itu lebih rendah dari produktivitas pertanian. Namun, setelah ditelusuri, faktor penyebabnya adalah banyaknya industri dengan pekerja hanya 4-5 orang dan belum termekanisasi. Perlu diketahui, Hoselitz mengelompokkan industri kecil ke dalam 2 kelompok, yakni industri dengan pekerja 4-5 orang dan industri dengan pekerja 6-49 orang. Ketika tipe yang pertama disingkirkan, produktivitas industri kecil menjadi jauh lebih tinggi, apalagi bila disertai dengan proses mekanisasi. Dari sini ia menyimpulkan bahwa langkah penting dalam industrialisasi di negara-negara sedang berkembang adalah pencapaian usaha yang melampaui ukuran industri kecil

---

<sup>28</sup>. B.F. Hoselitz, "Small Industry in Underdevelopment Countries" dalam I. Livingstone (ed.), *Economic Policy....., op.cit.*, hlm. 264.

<sup>29</sup>. *Ibid.*



tipe pertama tadi<sup>30</sup>.

*Labour intensive* di satu sisi dan produktivitas yang rendah di sisi lain kiranya telah menjadikan industri kecil di negara-negara sedang berkembang memiliki kontribusi yang besar dalam menyerap tenaga kerja, tetapi tidak cukup handal untuk meningkatkan pendapatan pekerja. Hal ini berbeda dengan kontribusi industri kecil di Jepang, yang cukup besar dalam menyerap tenaga kerja dan sekaligus mampu memberi penghasilan yang memadai bagi para pekerjanya. Industri kecil di negeri sakura ini produktivitasnya tinggi, rata-rata telah mengalami mekanisasi, dan dari segi manajemen juga terkoordinasi secara baik.

### **Ekspor Produk Manufaktur**

Seperti telah dikemukakan, pada akhir 1960an sejumlah negara sedang berkembang telah mencapai batas substitusi impor dan industrialisasi mulai melambat. Pasar dalam negeri yang amat terbatas tidak mampu mengakomodasi seluruh produk industri manufaktur yang dihasilkannya. Dalam kondisi demikian, industrialisasi hanya dapat dipertahankan bila produk-produk manufaktur mendapatkan pasar di negara lain. Ekspor manufaktur kemudian menjadi orientasi baru, baik ke sesama negara sedang berkembang maupun ke negara-negara maju. Pada tahun-tahun awal volume ekspor mereka tumbuh pada laju yang tinggi, yakni 10 persen setiap tahunnya<sup>31</sup>.

Ditemukannya pasar bagi produk manufaktur negara sedang berkembang di negara-negara maju berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di negara-negara beriklim sedang itu. Setelah Perang Dunia Kedua negara-negara maju di Eropa telah sampai pada kondisi kelangkaan tenaga kerja yang berupah rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang mendekati "nol" di satu sisi, dan pertumbuhan industri yang cukup pesat di sisi lain. Salah satu reaksi sistem

---

<sup>30</sup>. *Ibid.*, hlm. 268-274.

<sup>31</sup>. W. Arthur Lewis, *op.cit.*, hlm. 32.

ekonomi terhadap tekanan tadi adalah kesediaan untuk mengimpor produk manufaktur yang dihasilkan oleh para pekerja berupah rendah dari negara-negara sedang berkembang<sup>32</sup>. Artinya, sampai batas tertentu, negara-negara sedang berkembang diuntungkan oleh perkembangan ketenagakerjaan dan industri di Eropa. Orientasi ekspor negara-negara sedang berkembang tidak hanya didorong oleh pasar dalam negeri yang sempit, tetapi juga ditarik oleh tuntutan baru negara-negara maju.

Dalam konteks manufaktur negara-negara sedang berkembang pada waktu itu, "dari dalam didorong ke luar, dan dari luar ditarik masuk". Dari sini tampak bahwa yang berkepentingan bukan hanya negara produsen (untuk menemukan pasar), tetapi juga negara konsumen (untuk mendapatkan produk yang sudah tidak ekonomis lagi untuk dihasilkan sendiri). Bahkan, kepentingan negara konsumen itu bisa dikatakan lebih besar, terutama bila diingat bahwa proporsi investasi yang cukup besar dalam industri manufaktur ekspor di negara-negara sedang berkembang adalah dari negara-negara maju itu sendiri. Di sini berlaku hal demikian: mengingat produk-produk manufaktur tertentu amat mereka butuhkan, sementara karena faktor kelangkaan tenaga kerja produk-produk itu tidak bisa diusahakan di dalam negeri, maka mereka memproduksinya di negara-negara sedang berkembang yang berlimpah dengan tenaga kerja murah (bahkan sering bisa dibayar di bawah upah minimum).

Mengingat modal dalam negeri amat terbatas, maka investasi asing telah mendongkrak secara signifikan skala ekspor produk manufaktur negara-negara sedang berkembang. Berdasarkan catatan Lewis, pada 1975 produk manufaktur merupakan 33 persen dari total ekspor negara-negara sedang berkembang, dan sepuluh tahun kemudian meningkat menjadi 50 persen<sup>33</sup>. Ini memberikan penanda yang amat jelas perihal ketidakberubahan negara-negara sedang berkembang dalam hal dipenetrasinya oleh

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 33-35.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 35-36



kepentingan ekonomi negara-negara maju. Memang, yang kasat mata adalah perubahan, tetapi sesungguhnya perubahan dalam ketidakberubahan. Perubahan itu adalah bahwa bila hingga akhir 1920an negara-negara sedang berkembang menjadi eksportir bahan mentah dan importir produk manufaktur, kini mereka menjadi eksportir produk manufaktur dan segera juga disertai dengan importir bahan makanan yang dari tahun ke tahun semakin membesar. Namun, perubahan ini harus diletakkan dalam konteks yang lebih nyata, yakni bahwa investasi asing tetap dalam proporsi yang amat besar, suatu investasi yang telah terjadi sejak zaman kolonial. Sektor yang dimasuki saja yang berbeda dari satu waktu ke waktu lain.

Seperti baru saja disinggung, luasnya pasar produk manufaktur tertentu di negara-negara maju telah menyebabkan mengalirnya investasi untuk produksi sektor itu dari negara-negara maju sendiri. Sudah barang tentu hal ini telah mengurangi beban kelebihan tenaga kerja di negara-negara sedang berkembang dan meningkatkan pendapatan nasional. Namun demikian, mengingat tingkat kelebihan tenaga kerja amat tinggi, kapasitas sektor industri modern untuk menyerap surplus tenaga kerja di negara-negara sedang berkembang tetap amat terbatas. Kasus Indonesia mutakhir jelas-jelas menunjukkan, tidak hanya masih terdapat amat banyak pengangguran terselubung, tetapi juga tidak sedikit terdapat pengangguran terbuka. Karena terlalu banyaknya pengangguran, negara-negara sedang berkembang pun, tak terkecuali Indonesia, juga mengekspor jutaan tenaga kerja tak terampil ke berbagai negara kaya.

Gambaran di atas mengesankan sesuatu yang suram. Realitasnya memang begitu. Akan tampak lebih suram lagi bila pengangguran yang begitu besar, meskipun sebagian telah harus diekspor dan sebagian lagi menceburkan diri ke sektor informal, disandingkan dengan hutang yang juga amat besar (teristimewa Indonesia). Namun demikian, gambaran suram tadi tidak harus memupuskan harapan. Paling tidak, Malaysia, Singapura, Korea misalnya toh mampu keluar dari masa lalu yang kurang menguntungkan. Banyak hal memang harus dibenahi, dan jelas

bukan pekerjaan yang mudah. Akan tetapi, ketika disadari bahwa program Keluarga Berencana (misalnya) ternyata berhasil dilakukan secara baik oleh masyarakat yang telah begitu lama akrab dengan semboyan “banyak anak banyak rezeki”, mengapa harus pesimis bahwa persoalan-persoalan rumit itu tidak pernah akan bisa diatasi di masa depan.

## Penutup

Dalam garis waktu yang relatif panjang, negara-negara yang kini sering disebut sebagai negara-negara sedang berkembang telah menjalani transformasi dari eksportir bahan mentah dan importir produk manufaktur menjadi eksportir produk manufaktur dan importir bahan makanan. Industri manufaktur sendiri semula ditujukan untuk substitusi impor, terutama seiring dengan pukulan maut depresi ekonomi dunia pada 1929 yang amat merugikan negara-negara pengekspor bahan mentah industri. Pasar dalam negeri yang amat sempit di satu sisi, dan semakin tidak mungkin produk-produk manufaktur tertentu dihasilkan di negara-negara maju pada sisi lain, telah mendorong orientasi baru bagi negara-negara sedang berkembang ke arah ekspor manufaktur.

Meskipun apabila dilihat dari jenis komoditas ekspor-impornya telah terjadi transformasi, terdapat realitas yang relatif tidak mengalami perubahan. Bahkan karena ada sesuatu yang tidak berubah di negara-negara sedang berkembang (tetapi ada perubahan di negara-negara maju), transformasi justru berlangsung. Pasar dalam negeri yang sempit, misalnya, bukan saja telah menyebabkan dorongan bagi negara-negara sedang berkembang ke arah ekspor produk manufaktur pada masa-masa yang lebih kemudian, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting bagi kecenderungan ke arah ekspor komoditas pertanian dan bahan baku industri pada masa-masa yang lebih awal. Artinya, dalam rentang waktu yang cukup lama, negara-negara sedang berkembang tidak mampu mengatasi secara signifikan problem pasar dalam negeri yang sempit. Ini tidak berarti tidak terjadi perubahan, tetapi perubahan yang telah berlangsung tidak



berhasil mengejar laju perkembangan ekonomi global.

Sempitnya pasar bisa diartikan sebagai daya beli yang rendah, dan daya beli yang rendah ini berkaitan erat dengan produktivitas yang juga rendah. Artinya, dalam garis waktu yang panjang pula, problem produktivitas yang rendah tidak teratasi secara berarti. Pengangguran terselubung yang cukup tinggi merupakan salah satu penanda penting perihail rendahnya produktivitas di negara-negara sedang berkembang. Pada tahap awal, pengangguran terselubung berkaitan dengan ekonomi subsistensi; dan pada tahap yang lebih kemudian, bersama-sama dengan pengangguran terbuka, berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, sedemikian rupa sehingga menyebabkan kelebihan tenaga kerja yang akut.

Tanpa harus mengabaikan peran dalam negeri, baik pada masa ekspor produk pertanian dan bahan baku industri, maupun pada masa ekspor produk manufaktur, investasi asing memiliki kontribusinya sendiri. Fenomena ini memberikan beberapa isyarat; pertama, modal dalam negeri tidak mencukupi. Kedua, logika kapitalisme adalah logika global-internasional, yang secara meyakinkan mampu menjebol sekat-sekat nasionalitas. Ketiga, dalam konteks ini, kolonialisme atau pasca-kolonialisme tidaklah relevan, mengingat seruan untuk masuknya investasi asing dilakukan baik oleh pemerintahan-pemerintahan kolonial maupun sederet pemerintahan nasional-merdeka. Keempat, terlepas dari perimbangannya seperti apa, kesalingtergantungan antara negara yang kekurangan modal dengan negara yang kelebihan modal tampaknya merupakan keniscayaan sejarah (setidaknya hingga saat ini).

Bila modal tidak harus diartikan secara sempit dalam wujud uang, negara-negara sedang berkembang sesungguhnya memiliki modal yang besar, yakni sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam yang melimpah telah membikin negara-negara maju tak jera-jeranya untuk mengarahkan perhatian mereka, bahkan sejak zaman kolonialisme klasik. Demikian juga, sumber daya manusia, yang sering dikeluhkan sebagai yang membebani, merupakan modal

yang sangat berharga. Disadari atau tidak, realitas ini memiliki posisi tawar tersendiri, terutama ketika negara-negara maju semakin akut dilanda oleh kekurangan tenaga kerja seiring dengan tingkat pertumbuhan penduduknya yang mendekati “nol” atau bahkan “nol”. Memang, jumlah yang besar saja tidak cukup, tetapi toh ada nilainya tersendiri (terutama pada saat ini). Apalagi, jika jumlah yang besar itu diimbangi dengan kualitas yang baik berkat pendidikan yang tidak asal jalan seperti sekarang ini.

Ketika negara-negara maju masih memiliki surplus tenaga kerja, dan produk manufaktur dapat dihasilkan sendiri secara lebih ekonomis, kebijakan yang muncul adalah membatasi impor produk manufaktur tadi. Namun, ketika kondisi tenaga kerja mereka berbalik, negara-negara maju tidak hanya membuka lebar-lebar impor produk manufaktur, tetapi juga menyponsori dengan cara investasi perkembangan sejumlah industri manufaktur itu sendiri di negara-negara sedang berkembang. Selintas memang terkesan berorientasi pada kepentingan aktual negeri sendiri; tetapi, sesungguhnya bisa pula dipahami secara positif dari perspektif negara-negara sedang berkembang. Siapa yang lebih tergantung menjadi tidak relevan, karena di antara keduanya terjalin kesalingtergantungan.

Barangkali pertanyaannya kemudian adalah, tetapi mengapa kesenjangan antara negara maju dan negara sedang berkembang tetap menganga lebar, plus negara maju cenderung mengeksploitasi negara sedang berkembang. Berbagai faktor telah dianalisis oleh para ahli ekonomi pembangunan. Satu hal yang kiranya masih terlepas adalah bagaimana negara sedang berkembang memahami surplus tenaga kerjanya, dan bagaimana pula negara maju memahami kesanggupan finansial, teknologi, dan sistem menejemennya. Rasanya selama ini pemerintahan di negara-negara sedang berkembang cenderung memahami tenaga kerja yang berlebih sebagai beban, bukan sebagai berkah. Menurut hemat saya, posisi tawar negara sedang berkembang terhadap negara maju akan ikut ditentukan oleh bagaimana surplus tenaga kerja yang dimiliki dipahami. Sementara itu,



negara-negara maju sejak lama memahami apa yang dimiliki sebagai keunggulan komparatif, sehingga hasilnya juga positif (bagi mereka).

Apabila pemerintahan negara-negara sedang berkembang memahami tenaga kerja mereka secara positif, maka penentuan upah minimum tidak harus disertai dengan kekhawatiran, dan setiap pelanggaran terhadapnya tidak harus dibiarkan seperti yang selama ini terjadi. Keberanian bertindak demi melindungi tenaga kerja, yang riil upahnya telah jauh lebih rendah dari upah di negara-negara maju, adalah bagian dari pemahaman positif terhadap eksistensi tenaga kerja dalam aktivitas ekonomi. Negara-negara sedang berkembang tidak harus dihantui oleh ketakutan akan hegemonya para investor asing, karena mereka tidak akan lagi menemukan di negeri mereka sendiri. Hal ini kiranya akan terjadi bila di antara sesama negara sedang berkembang memiliki komitmen yang sama atas eksistensi mereka dalam percaturan ekonomi internasional. Bila tidak, maka negara-negara sedang berkembang akan seperti sedia kala, tidak akan memiliki posisi tawar yang lebih baik. Secara sederhana, bagaimanapun juga uang, mesin, dan sistem manajemen tidak akan memiliki arti apapun tanpa keterlibatan manusia-manusia pekerja.

Sudah barang tentu hal yang harus diupayakan oleh negara-negara sedang berkembang tidak sebatas ini saja. Mengingat salah satu duduk perkaranya adalah pasar dalam negeri yang sempit (daya beli masyarakat yang rendah), maka salah satu agenda besar negara-negara sedang berkembang adalah meningkatkan daya beli itu. Caranya tidak ada lain kecuali dengan meningkatkan produktivitas masyarakat. Perbaikan kualitas manusia, baik pada aspek intelektual (kecakapan) maupun moral (integritas), melalui pendidikan yang lebih baik tidak boleh diabaikan. Terobosan-terobosan baru dalam rangka meningkatkan produktivitas akan ditopang salah satunya yang penting oleh kualitas manusia. Rasanya negara-negara sedang berkembang perlu mendesain kurikulum pendidikan formal ataupun non-formal yang sekaligus bisa menumbuhkan

semangat atau jiwa kewirausahaan, tanpa harus silau dengan yang telah dicapai oleh negara-negara maju.

### Daftar Pustaka

Ahimsa-Putra dkk., *Ekonomi Moral, Rasional, dan Politik dalam Industri Kecil di Jawa: Esai-esai Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: Kepel Press, 2003.

Burger, D.H., *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia II*. Djakarta: Pradnja Paramita, 1970.

Hoselitz, B.F., "Small Industry in Underdeveloped Countries", dalam I. Livingstone (ed), *Economic Policy for Development: Selected Readings*. Middlesex: Penguin Book, 1971.

Lewis, W. Arthur, *The Evolution of the International Economic Order*. Princeton: Princeton University Press, 1978.

McClelland, E.E. dan Harold K. Schneider (ed), *Economic Anthropology: Reading in Theory and Analysis*. New York: Holt, Rinehart, and Winston, Inc., 1968.

Livingstone, I., "Agriculture versus Industry in Economic Development", dalam I. Livingstone (ed), *Economic Policy for Development: Selected Readings*. Middlesex: Penguin Book, 1971.

Lynt, H., "The Classical Theory of International Trade and Underdeveloped Countries", dalam I. Livingstone (ed), *Economic Policy for Development: Selected Readings*. Middlesex: Penguin Book, 1971.

Myrdal, Gunnar, *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Oxford: Basil Blackwell, 1953.



Safri Sairin, dkk., *Pengantar Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Silverio R.L. Aji Sampurno dkk (ed), *Indonesia Alternatif: Rakyat sebagai Pemegang Kedaulatan Tertinggi*. Yogyakarta: LPUSD, 2003.

Wertheim, W.F., *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.